

**PELATIHAN TATA KELOLA ADMINISTASI NAGARI  
BAGI APARATUR PEMERINTAHAN NAGARI  
DI NAGARI PERSIAPAN KAMANG TANGAH ANAM SUKU  
KECAMATAN KAMANG MAGEK, KABUPATEN AGAM**

**Nurman, Al Rafni, Suryanef, Hasrul, dan Rita Anggraini**  
Staf Pengajar Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang

**ABSTRAK**

Pengabdian kepada masyarakat ini dilatarbelakangi oleh adanya pemekaran nagari di Kabupaten Agam yaitu Nagari Kamang Mudiak yang terletak di Kecamatan Kamang Magek. Sebagai nagari hasil pemekaran Nagari Persiapan Kamang Tengah Anam Suku memerlukan banyak persiapan menuju nagari definitif, diantaranya masalah penguasaan tata kelola administrasi pemerintahan nagari. Program pelatihan dan *workshop* telah dilaksanakan. Hasilnya menunjukkan adanya peningkatan penguasaan tata kelola administrasi nagari persiapan tersebut.

Kata kunci : tata kelola administrasi, nagari persiapan, perangkat nagari.

**PENDAHULUAN**

Pemekaran nagari merupakan suatu upaya pemerintah untuk mendekatkan fungsi-fungsi pelayanan kepada masyarakat agar tercipta tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Salah satu yang menjadi perhatian bagi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang dapat melaksanakan fungsinya secara efektif adalah bagaimana mengelola, merencanakan dan melaksanakan administrasi pemerintahan yang baik.

Pengabdian kepada masyarakat ini bertolak dari hasil penelitian Suryanef, Al Rafni, dan Nurman selama 4 tahun (*multi years*) dimana pada enam kabupaten yang diteliti terdapat kecenderungan masih lemahnya tata kelola administrasi pemerintahan nagari. Penelitian yang dilakukan tahun 2009-2011

mengindikasikan persoalan berikut ini : (1) rendahnya kualitas sumberdaya manusia hampir pada semua kelembagaan yang ada ; (2) sistem dan prosedur kerja yang belum tertata dengan baik ; (3) minimnya kemampuan aparatur pemerintahan nagari dalam melaksanakan administrasi dan fungsi-fungsi pemerintahan.

Penelitian selanjutnya tentang tata kelola pemerintahan nagari yang dilakukan oleh M. Fachri Adnan dan Al Rafni (2014-2015) juga menemukan bahwa kemampuan aparatur pemerintahan nagari di Sumatera Barat masih rendah dalam memahami dan melaksanakan tata kelola pemerintahan termasuk bagaimana mengelola dan merencanakan serta melaksanakan administrasi pemerintahan nagari secara baik.

Permasalahan yang serupa juga ditemukan di Nagari Persiapan

Kamang Tengah Anam Suku Kecamatan Kamang Magek sebagai hasil pemekaran Nagari Kamang Mudiak. Hasil studi pendahuluan dan diskusi dengan pemerintahan nagari induk yaitu Pemerintahan Nagari Kamang Mudiak menunjukkan bahwa aparat nagari persiapan perlu mendapatkan penyuluhan dan pelatihan administrasi pemerintahan nagari agar tata kelola administrasi pemerintahan dapat terlaksana dengan baik nantinya.

Nagari Persiapan Kamang Tengah Anam Suku dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Agam No.37 tahun 2017 dan tercatat dengan nomor register 06.15.2004. Pusat pemerintahan Nagari Persiapan Kamang Tengah Anam Suku terletak di Jorong Pakan Senayan. Penduduk berjumlah 3.195 jiwa dan terdiri atas 871 Kepala Keluarga (KK). Adapun luas wilayah nagari ini adalah 12,85 km<sup>2</sup>. Cakupan wilayahnya terdiri dari 2 jorong yaitu Jorong Bansa dan Jorong Pakan Senayan. Nagari ini memiliki batas nagari sebagai berikut : (1) sebelah Utara dengan Nagari Kamang Mudiak ; (2) sebelah Selatan dengan Kecamatan Tilatang Kamang ; (3) sebelah Barat dengan Nagari Kamang Mudiak ; dan (4) sebelah Timur dengan Nagari Kamang Hilir.

Untuk memecahkan persoalan mitra, maka dilakukan penyuluhan peningkatan pengetahuan dan pelatihan pada khalayak sasaran yaitu aparat pemerintahan nagari tentang : (1) administrasi umum pemerintahan nagari ; (2) administrasi kependudukan dalam pemerintahan nagari ; (3)

administrasi keuangan pemerintahan nagari ; dan (4) administrasi pembangunan pada pemerintahan nagari.

Tata kelola administrasi pemerintahan nagari merupakan ujung tombak bagi lancarnya sistem pelayanan pemerintahan nagari yang bersangkutan. Bagaimana pandangan masyarakat terhadap pemerintahan nagari sangat tergantung pada efektif atau tidaknya pemerintahan nagari bekerja secara administratif dalam melayani masyarakat nagari. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No.47/2016 telah mengatur secara rinci tentang bagaimana mengelola administrasi pemerintahan desa atau nagari.

Administrasi pemerintahan nagari adalah keseluruhan proses kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai pemerintahan nagari pada buku register nagari. Menurut Taliziduhu Ndraha (2003) administrasi pemerintahan adalah proses penjagaan (*keeping and caring*) dan penyampaian (*forwarding and delivering*) produk pemerintah tertentu kepada konsumen dan memberdayakan konsumen untuk menggunakan produk tersebut. Hal ini dilakukan dengan cara dan alat yang sesuai dengan kondisi konsumen sedemikian rupa sehingga konsumen menerimanya utuh dan memperoleh manfaat sebesar-besarnya. Dengan demikian tujuan administrasi pemerintahan pada hakekatnya memberikan pelayanan pemerintahan kepada masyarakat, baik secara individual ataupun kelompok. Hal utama yang menyangkut pelayanan administrasi

adalah cara bagaimana pelayanan diberikan agar lebih efektif dari waktu ke waktu.

Tujuan tata kelola administrasi pemerintahan nagari adalah mewujudkan tertib administrasi nagari yang mampu berfungsi sebagai sumber data dan informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan nagari, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Adapun ruang lingkup administrasi pemerintahan nagari sebagai berikut :

1. Administrasi umum adalah pencatatan data dan informasi mengenai kegiatan pemerintahan nagari pada buku administrasi umum.

2. Administrasi penduduk adalah kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai kependudukan pada buku administrasi penduduk.

3. Administrasi keuangan adalah kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai pengelolaan keuangan nagari pada buku administrasi keuangan.

4. Administrasi pembangunan adalah kegiatan pencatatan dan informasi pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat pada buku administrasi pembangunan.

Penyelenggaraan administrasi pemerintahan nagari dilakukan melalui :

1. Tertib pencatatan data dan informasi dalam buku-buku register nagari.

2. Pengembangan buku register nagari yang diperlukan serta menyelenggarakan pelaporan sesuai ketentuan perundang-undangan.

3. Penyelenggaraan dan pengembangan administrasi pemerintahan nagari melalui tertib pencatatan data dan pengembangan buku register nagari disesuaikan dengan kebutuhan, tingkat perkembangan pemerintahan nagari, dan kompleksitas permasalahan yang dihadapi didalam pencatatan data dan informasi berbagai kegiatan.

Berkenaan dengan kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai kegiatan-kegiatan pemerintahan nagari dimuat dalam administrasi umum yang meliputi :

1. Buku peraturan nagari.
2. Buku keputusan walinagari.
3. Buku inventaris dan kekayaan nagari.
4. Buku aparat pemerintah nagari.
5. Buku tanah kas nagari.
6. Buku tanah nagari.
7. Buku agenda.
8. Buku ekspedisi.
9. Buku lembaran nagari dan buku berita nagari.

Selanjutnya dalam hal kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai kependudukan di nagari, baik mengenai penduduk sementara, penambahan dan pengurangan penduduk maupun perkembangan penduduk dimuat dalam administrasi penduduk. Administrasi penduduk meliputi :

1. Buku induk penduduk.
2. Buku mutasi penduduk nagari.
3. Buku rekapitulasi jumlah penduduk.
4. Buku penduduk sementara.
5. Buku kartu tanda penduduk dan buku kartu keluarga.

Hal yang penting diperhatikan dalam konteks administrasi penduduk adalah keharusan

walinagari untuk melaporkan buku rekapitulasi jumlah penduduk kepada bupati melalui camat setiap akhir bulan dalam bentuk rekapitulasi jumlah penduduk.

Sementara itu kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai pengelolaan keuangan nagari dimuat dalam administrasi keuangan nagari. Administrasi keuangan nagari meliputi :

1. Buku Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Nagari.
2. Buku Rencana Anggaran Biaya.
3. Buku Kas Pembantu Kegiatan.
4. Buku Kas Umum.
5. Buku Kas Pembantu.
6. Buku Bank Nagari.

Sedangkan kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dimuat dalam administrasi pembangunan yang meliputi :

1. Buku rencana kerja pembangunan nagari.
2. Buku kegiatan pembangunan.
3. Buku inventarisasi hasil-hasil pembangunan.
4. Buku kader pendampingan dan pemberdayaan masyarakat.

## **METODE PELAKSANAAN**

Pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan dalam dua bentuk kegiatan yaitu pelatihan dan *workshop*. *Pertama*, pelatihan berisi ceramah interaktif untuk memaparkan bagaimana tata kelola administrasi pemerintahan yang efektif dan efisien sehingga menunjukkan pelayanan yang prima baik dari sisi perangkat nagari maupun dari sisi masyarakat

pengguna layanan. *Workshop* yang bertujuan mengimplementasikan tata kelola administrasi pemerintahan nagari.

Metode yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan ini sebagai berikut :

1. *Ice breaking*, dilaksanakan dengan pertanyaan awal yang berfungsi untuk pencairan suasana sekaligus menghidupkan suasana agar peserta siap menerima pelatihan dan terhindar dari kejenuhan.

2. Ceramah/pemberian materi. Pemberian materi dilakukan agar peserta pelatihan dapat meningkatkan pemahamannya tentang tata kelola administrasi pemerintahan nagari, baik administrasi umum, administrasi kependudukan, administrasi keuangan, dan administrasi pembangunan sehingga dapat menjadikan nagari yang melaksanakan prinsip-prinsip *good governance* kedepannya.

3. Lokakarya. Dilakukan untuk melatih keterampilan peserta dalam mengelola empat cakupan utama administrasi pemerintahan nagari yaitu : (1) administrasi umum ; (2) administrasi kependudukan ; (3) administrasi keuangan ; dan (4) administrasi pembangunan. Melalui lokakarya yang dilakukan maka aparatur pemerintahan nagari persiapan ini akan mempunyai wawasan dan keterampilan yang baik nantinya.

4. *Brainstorming*, merupakan proses pengumpulan gagasan bersama dan menjadikan suatu inventarisasi model tata kelola administrasi pemerintahan nagari.

5. Diskusi, merupakan proses yang dilakukan untuk membahas masalah yang ditemui di lapangan. Diskusi dilakukan pada setiap bagian materi yang dianggap sulit.

6. Praktek. Praktek bagaimana melakukan pengelolaan administrasi pemerintahan nagari yang tepat dan baik.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Hasil dari kegiatan pengabdian ini dapat dicermati melalui angket evaluasi kegiatan. Dari instrumen evaluasi tergambar sejumlah 82% khalayak sasaran merasakan peningkatan pemahaman dan keterampilannya dalam tata kelola administrasi pemerintahan nagari terutama administrasi umum, administrasi kependudukan, administrasi keuangan, dan administrasi pembangunan pada pemerintahan nagari.

Dalam upaya mendukung efisiensi dan produktifitas perangkat pemerintahan nagari, perbaikan dan pengembangan ketatalaksanaan pemerintahan merupakan salah satu kebijakan yang penting dan menempati prioritas tinggi dalam pendayagunaan aparatur pemerintahan nagari. Ruang lingkup pengembangan sistem dan metode kerja meliputi penyederhanaan prosedur, penyiapan pedoman tatalaksana pelayanan, tata hubungan kerja pemerintahan nagari, penyusunan standarisasi pedoman teknis di bidang administrasi umum, anggaran dan kearsipan. Kebijakan pengembangan ketatalaksanaan aparatur diarahkan

untuk mewujudkan tertib administratif, dalam arti cara kerja yang tidak birokratis, sehingga pelayanan masyarakat semakin lancar, mudah, nyaman dan murah (PPS Unand, 2004).

Pengembangan ketatalaksanaan akan didorong melalui peningkatan semangat kerja dengan mengembangkan dan memantapkan nilai-nilai budaya kerja menuju perubahan sikap dan perilaku produktif dalam pelaksanaan tugas aparatur pemerintahan nagari baik secara individual maupun dalam kelompok-kelompok kerja. Strategi yang ditempuh adalah penyusunan berbagai produk pedoman umum ketatalaksanaan sebagai acuan pemerintahan nagari sehingga dapat mewujudkan penyederhanaan ketatalaksanaan, menuju peningkatan efisiensi dan produktifitas kerja. Untuk menunjang pelaksanaan kebijaksanaan pemerintahan nagari di bidang ketatalaksanaan (tertib administrasi) strategi yang mungkin dilakukan adalah :

1. Perubahan sikap dan perilaku aparatur pemerintahan nagari menuju budaya kerja produktif dan transparan ;

2. Penyederhanaan sistem operasional prosedur tatalaksana administrasi pemerintahan dan pembangunan ;

3. Pemanfaatan teknologi informasi menuju efisiensi pelaksanaan pekerjaan,

4. Pengembangan budaya kerja aparatur menuju aparatur yang

profesional, bermoral dan bertanggung jawab ; dan

5. Pendayagunaan sumber daya yang dimiliki (PPS Unand, 2004).

Dengan demikian model administrasi pemerintahan nagari yang efektif hendaknya sesuai dengan perkembangan paradigma administrasi negara yang populer dengan sebutan *new public service*. Dalam buku *The New Public Service, Serving not Steering* yang ditulis oleh Janet V. Denhardt dan Robert B. Denhardt (2002) menyatakan bahwa administrator publik seharusnya memusatkan perhatiannya pada tanggung jawab melayani dan memberdayakan warganegara melalui pengelolaan organisasi publik. Perspektif *new public service* ini mengawali pandangannya dari pengakuan partisipasi warganegara dan hal ini sesuai dengan ikon pemerintahan demokratis. Nagari sebagai sub sistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah hendaknya lebih banyak melibatkan masyarakat dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan nagari. Perspektif *new public service* menurut Denhardt dan Denhardt (2002) pada dasarnya memiliki beberapa prinsip :

1. Kepentingan publik merupakan hasil dialog tentang nilai-nilai bersama dari agregasi kepentingan pribadi perorangan, maka abdi masyarakat tidak semata-mata merespon tuntutan pelanggan tetapi memusatkan perhatian untuk membangun kepercayaan dan kolaborasi dengan dan diantara warganegara.

2. Administrator publik harus memberikan sumbangsih untuk membangun kepentingan publik bersama. Tujuannya tidak untuk menemukan solusi cepat yang diarahkan oleh pilihan-pilihan perorangan, tetapi menciptakan kepentingan bersama dan tanggungjawab bersama.

3. Kepentingan publik lebih baik dijalankan oleh abdi masyarakat dan warganegara yang memiliki komitmen untuk memberikan sumbangsih bagi masyarakat daripada dijalankan oleh para manajer wirausaha yang bertindak seolah-olah uang masyarakat adalah milik mereka sendiri.

4. Kebijakan dan program untuk memenuhi kebutuhan publik dapat dicapai secara efektif dan bertanggungjawab melalui upaya kolektif dan proses kolaboratif.

5. Abdi masyarakat seharusnya lebih peduli daripada mekanisme pasar. Selain itu abdi masyarakat juga harus mematuhi peraturan perundang-undangan, nilai-nilai kemasyarakatan, norma politik, standar profesional, dan kepentingan warganegara.

6. Penting bagi abdi masyarakat untuk menggunakan kepemimpinan yang berbasis pada nilai bersama dalam membantu warganegara mengemukakan kepentingan bersama dan mematuhihinya daripada mengontrol atau mengarahkan masyarakat ke arah nilai baru.

7. Organisasi publik beserta jaringannya lebih memungkinkan





mencapai keberhasilan dalam jangka panjang jika dijalankan melalui proses kolaborasi dan kepemimpinan bersama yang didasarkan pada penghargaan pada semua orang.

#### **KESIMPULAN DAN SARAN**

Dari dua bentuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat yaitu pelatihan dan *workshop* dapat disimpulkan bahwa animo masyarakat untuk mengetahui, memahami, dan terampil dalam mengelola administrasi nagari semakin meningkat. Untuk itu diperlukan sosialisasi untuk segmentasi masyarakat lainnya agar pelayanan administrasi dapat efektif dan efisien dalam menopang pemerintahan nagari persiapan untuk menjadi nagari definitif nantinya.

#### **UCAPAN TERIMAKASIH**

Terimakasih kepada Rektor Universitas Negeri Padang yang telah mendukung terselenggaranya pengabdian kepada masyarakat ini melalui pengalokasian dana. Terimakasih juga ditujukan kepada Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, dan Camat Kamang Magek serta Aparat dan tokoh masyarakat Nagari Persiapan Kamang Tengah Anam Suku yang telah memberikan bantuan bagi terlaksananya pengabdian kepada masyarakat ini.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

Adnan, M.Fachri & Al Rafni (2015), *Konseptualisasi Model Tata Kelola Pemerintahan Nagari sesuai Prinsip Good Governance*, Laporan penelitian, Universitas Negeri Padang.

\_\_\_\_\_ (2014), *Konseptualisasi Model Tata Kelola Pemerintahan Nagari sesuai Prinsip Good Governance*, Laporan penelitian, Universitas Negeri Padang.

Al Rafni, dkk. (2005). *Pembinaan dan Penataan Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari di Sumatera Barat*. Laporan Penelitian, Kerjasama Lembaga Penelitian Universitas Negeri Padang dengan Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Barat.

Bakaruddin RA. (2004). *Administrasi Keuangan Nagari*. Surat Kabar Tuah Sakato.

Hanif Nurcholis. (2002). *Administrasi Pemerintahan Daerah*. Jakarta : Pusat Penerbitan Universitas Terbuka.

IRE. (2003). *Pembaharuan Pemerintahan Desa*. Yogyakarta : IRE Press.

Karjuni Dt. Maani. (2005). *Ketatalaksanaan Administrasi Pemerintahan Kelurahan*. Makalah kegiatan pengabdian masyarakat di Kelurahan Nanggalo, Kota Padang. Tanggal 12 Juli 2005.

Nandang Alamsyah. (2002). *Administrasi Pertanahan*. Jakarta : Pusat Penerbitan Universitas Terbuka.



PPS-Unand. (2004). *Rancangan Modul Pelatihan Pengelolaan Pembangunan di Tingkat Lokal Nagari, Desa dan Kelurahan*. Padang : Pemda Provinsi Sumbar-Perform RTI.

Suryanef, Al Rafni, dan Nurman. (2009 - 2011), *Pemberdayaan Masyarakat Adat sebagai Basis Penataan Pemerintahan Nagari di Sumatera Barat*, Laporan Penelitian Hibah Bersaing, Lembaga Penelitian Universitas Negeri Padang.